

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki penduduk yang besar dengan jumlah penduduk yang berkisaran 268 juta jiwa yang terbagi dalam 34 provinsi¹. Dengan populasi penduduk terbesar Indonesia dihadapkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Masalah kemiskinan sudah menjadi hal yang biasa terjadi di setiap Negara, baik negara maju maupun negara berkembang, terutama di Negara berkembang seperti Indonesia.

Di Indonesia, masalah kemiskinan menjadi pusat perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional yang terjadi di seluruh wilayah mulai dari perkotaan sampai pelosok desa yang sangat beragam dalam memenuhi kebutuhan hidup, karena keberagaman kebutuhan hidup manusia, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek.

Dilihat dari aspek kebijakan umum, maka kemiskinan berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan, dan aspek skunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi, dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk

¹ www.BPS.co.id Diakses Pada Selasa 6 Oktober 2020 Pukul. 09:13 WIB

kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.²

Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan mempengaruhi produktivitas yang menyebabkan dapat meningkatkannya beban ketergantungan bagi masyarakat. Masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan rendah, tidak berpendapatan tetap atau tidak berpendapatan sama sekali.

Islam memandang kemiskinan sebagai satu hal yang mampu membahayakan keluarga dan masyarakat yang dapat mempengaruhi akhlak dan kelogisan berfikir seseorang, dan Islampun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya.³

Dalam perspektif Islam, kemiskinan muncul diakibatkan beberapa penyebab struktural. *Pertama*, perbuatan manusia yang merusak alam sehingga manusia itu sendiri yang merasakan dampak dari perbuatannya. *Kedua*, ketidakpedulian dan kekikiran orang yang kaya sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. *Ketiga*, perilaku manusia yang bersikap zalim, eksploitatif dan menindas manusia lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, memakan harta anak yatim, dan memakan harta riba. *Keempat*, adanya konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan, seperti dalam kisah Firaun, Haman dan Harun yang bersekutu menindas rakyat mesir

² Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*,(Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2010) Hlm.299

³ Nurul Huda Dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) Hlm. 23

pada masa nabi Musa a.s. *Kelima*, gejala eksternal yang terjadi seperti bencana alam atau peperangan.⁴

Kemiskinan dalam Islam disebut sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan primer yaitu sandang, pangan dan papan. jika tidak terpenuhi, maka akan berakibat pada kemunduran eksistensi manusia.⁵

World Bank mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan ukuran kemampuan atau daya beli, yaitu US \$1 atau US \$2 per kapita per hari.⁶ Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.⁷

Perkembangan jumlah penduduk miskin di indonesia jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan seperti pada tabel dibawah ini:⁸

⁴ Amir Machmud, *Ekonomi Islam Untuk Dunia Yang Lebih Baik*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2017) Hlm. 223

⁵ Husna Ni'matul Ulya, *Paradigma Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Konvensional*, Jurnal Of Islamic Economics And Business Vol. 01 No. 01, 2018, Hlm. 139

⁶ Erwan Agus P, *Mengkaji Potensi Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik Vol. 10 No. 3, 2007, Hlm. 300

⁷ www.BPS.co.id Diakses Pada Selasa 6 Oktober 2020 Pukul. 13:31 WIB

⁸ Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*, Hlm.2 (On-line) tersedia di: <https://www.bps.go.id> (diakses pada, minggu 11 oktober 2020)

Tabel 1.1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
2014	27,73	10,96
2015	28,51	11,13
2016	27,76	10,70
2017	26,58	10,12
2018	25,67	9,66
2019	24,79	9,22

Sumber: diolah dari data Sosial Ekonomi Nasional (susenas)

Dari uraian tabel diatas penduduk miskin pada tahun 2014 mencapai 27,73 juta penduduk atau 10,96 persen, pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 28,51 juta penduduk atau 11,13 persen, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 27,76 juta penduduk atau 10,70 persen, pada tahun 2017 turun menjadi 26,58 juta penduduk atau 10,12 persen, pada tahun 2018 turun menjadi 25,67 juta penduduk atau 9,66 persen, dan pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan juga seperti tahun-tahun sebelumnya menjadi 24,79 juta penduduk atau 9,22 persen. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak.

Berbagai kebijakan telah diambil pemerintah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, salah satunya melalui pemberdayaan keluarga miskin, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Undang Undang Nomor. 40 Tahun 2004 Tentang jaminan sosial yang ditindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial kepada Rumah Tangga Miskin dengan syarat yang telah ditentukan dan yang telah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.⁹

Program Keluarga Harapan (PKH) ialah pengembangan dari sistem perlindungan sosial yang bertujuan meringankan dan membantu keluarga miskin dalam hal mendapatkan akses fasilitas pelayanan kesehatan dan Pendidikan dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas sumber daya manusia

Adapun tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

⁹ <https://pkh.kemsos.go.id> diakses pada Selasa 06 Oktober 2020 pukul 20:03 WIB

¹⁰ Kemensos RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2020*, Hlm.3, (On-line) tersedia di <https://pkh.kemensos.go.id> (di akses pada Selasa 06 Oktober 2020 pukul 21:31 WIB)

3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam akses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ialah keluarga miskin dan rentan yang telah terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.¹¹

Bantuan yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat diberikan secara bertahap yaitu ada empat tahapan dalam satu tahun, masyarakat yang penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) selain diberikan bantuan langsung bersyarat, juga diberikan pendamping dalam melaksanakan program ini, pendamping bertugas memberikan pendampingan kepada masyarakat agar terciptanya ekonomi kreatif sehingga terlepas dari kemiskinan, sehingga Program Keluarga Harapan (PKH) ini memberikan bantuan yang sekaligus mendidik masyarakat agar tidak selalu bergantung dan mengharapkan uluran tangan dari pemerintah.

Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, seperti sasaran penerima bantuan harus masuk kedalam kategori keluarga miskin serta memiliki syarat komponen

¹¹ Diktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Petunjuk Juknisi Penyaluran Bantuan Non Tunai Program Keluarga Harapan 2018*, Hlm. 4 (On-Line) Tersedia Di <https://Pkh.Kemensos.Go.Id> (Diakses Pada 26 Februari 2021 Pukul 22:21)

pendidikan dan kesehatan. Bantuan yang diterima harus sesuai yang telah ditetapkan, dan diberikan pendamping yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap keluarga penerima manfaat. Keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat diwajibkan menyekolahkan anak minimal 12 tahun dan wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan.

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan secara berkelanjutan yang dimulai pada tahun 2007 di 7 provinsi sampai saat ini, perkembangan Program Keluarga Harapan (PKH) dari 2007 hingga 2019 sebagai berikut:¹²

Tabel 1.2
Perkembangan KPM PKH

TAHUN	PROVINSI	KAB/KOTA	KECAMATAN	KPM PKH
2007	7	48	337	387.947
2008	13	70	637	620.848
2009	13	70	781	726.376
2010	20	88	946	774.293
2011	25	119	1387	1.052.201
2012	33	169	2001	1.454.655
2013	33	336	3417	2.326.533
2014	34	418	4870	2.871.827
2015	34	472	6080	3.511.088

¹² Kemensos RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2020*, Hlm. 14 (On-line) tersedia di <https://pkh.kemensos.go.id> (diakses pada Selasa 06 Oktober 2020 pukul 21:31 WIB)

2016	34	504	6402	5.981.528
2017	34	509	6730	6.228.810
2018	34	512	7214	10.000.232
2019	34	512	6709	9.841.270

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Program keluarga harapan 2020

Tercatat dari tahun 2007 yang hanya tujuh provinsi dan pada tahun 2014 program ini sudah terlaksana di seluruh provinsi di Indonesia hingga saat ini yang mencakup 34 provinsi 512 kabupaten/ kota dan 6709 kecamatan, besarnya jumlah keluarga penerima manfaat program ini diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan sesuai dengan tujuan dilaksanakannya program ini. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Sahib mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan¹³, namun hasil penelitian dari Saraswati mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.¹⁴

Dalam hal ini Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi, seperti halnya di Desa Pulau Betung Kecamatan Pampangan.

Desa Pulau betung terletak di Kecamatan Pampangan yang merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan jarak

¹³ Munawwar Sahib, Tesis: Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016

¹⁴ Aprilia Saraswati, Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pakon Pandansurat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pringsewu), Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018

ke Ibu Kota Kabupaten ± 42 km. Kecamatan ini terletak di sebelah Timur Laut Ibu Kota Kabupaten Komering Ilir (Kayu Agung), yang terbagi kedalam 22 desa salah satunya Desa Pulau Betung.¹⁵

Desa Pulau Betung merupakan desa yang cukup banyak keluarga yang mendapatkan manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini, yaitu sebanyak 155 Keluarga Penerima Manfaat PKH. Dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ditemukan kejanggalan dalam pengelolaan kemiskinan terutama dalam penetapan keluarga miskin. Berdasarkan latar belakang diatas masih banyak masalah dalam perlaksanaan PKH maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Peserta PKH Di Desa Pulau Betung Kecamatan Pampangan)**

B. Rumusan Masalah

Dalam Uraian yang telah disebutkan pada latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan Kemiskinan studi kasus pada peserta PKH Desa Pulau Betung Kecamatan Pampangan?
2. Bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pulau Betung Kecamatan Pampangan dalam perspektif ekonomi Islam?

¹⁵ BPS Ogan Komering Ilir, *Kecamatan Pampangan Dalam Angka*, 2019, Hlm. 3 (On-line) Tersedia di: <https://okikab.bps.go.id> (diakses pada sabtu 30 januari 2021 pukul 13:06 WIB)

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan studi kasus pada peserta PKH Desa Pulau Betung Kecamatan Pampangan.
2. Menjelaskan bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pulau Betung Kecamatan Pampangan dalam perspektif ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah manfaat yang dapat diambil atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian kemiskinan dan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam pengentasan masalah kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk mengambil kebijakan dan keputusan dalam pengentasan permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

b) Bagi Penulis

Untuk mengetahui perbandingan teori dan fakta dilapangan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan.

c) Bagi Akademis

Menambah pengetahuan dalam kebijakan yang diambil pemerintah untuk memberantas kemiskinan melalui Program Keluarga harapan.

E. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan dapat dipahami dengan jelas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Maka penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Penelitian yang dilakukan fokus pada variabel efektivitas yang dibatasi pada tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat penggunaan.
2. Penelitian yang dilakukan fokus Pada Pengentasan Kemiskinan.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian skripsi tersusun dengan sistematis dan mempermudah pembahasan maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat pelaksanaan penelitian serta sistematika penulisan

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian. Berisi definisi-definisi dan teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari beberapa sumber

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta gambaran umum lokasi penelitian.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti penelitian berupa observasi, wawancara pada peserta PKH di Desa Pulau Betung mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan dan dilihat dalam perspektif ekonomi Islam.

5. BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan tentang hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah serta saran terhadap permasalahan-permasalahan yang diangkat penulis.